

ARTIKEL ILMIAH

**ANALISIS EFEKTIFITAS PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI SAMPAH
KABUPATEN ROKAN HULU**



OLEH:

**JUFAIZAL
1225077**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
TAHUN 2016**

LEMBAR PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

**ANALISIS EFEKTIFITAS PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI SAMPPAH
DI KABUPATEN ROKAN HULU**

**Karya Ilmiah Ini Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat Kelulusan
Studi Sarjana (S-1) Di Universtas Pasir Pengaraian**

Ditetapkan Dan Disahkan Di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal Juni 2016

Oleh:


Andi Afrizal, SE, M.Si, AK, CA
Pembimbing I


Seprini, SE, MM
Pembimbing II

Mengetahui,

SEPRINI, SE, MM
Ketua Program Studi

Surat Pernyataan Sumber Tulisan Artikel Ilmiah

Saya yang menandatangani surat pernyataan ini:

Nama : JUFAIZAL

Nim : 1225077

- 1) Menyatakan bahwa Artikel Ilmiah yang saya tulisan benar bersumber dari kegiatan penelitian/perencanaan yang telah dilakukan sendiri oleh penulis bukan oleh pihak lain.
- 2) Naskah ini belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk prosiding maupun jurnal sebelumnya.

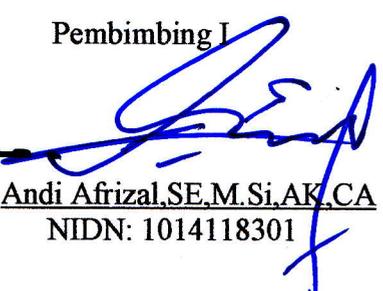
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan pihak manapun juga untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Pengaraian, Juni 2016

Yang Membuat Pernyataan,

Pembimbing I


Jufaizal
NIM: 1225077


Andi Afrizal, SE, M, Si, AK, CA
NIDN: 1014118301

Mengetahui,
Ketua Program Studi Manajemen


SEPRINI, SE, MM
NIDN: 102 509 7804

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI SAMPAH DI KABUPATEN ROKAN HULU

Jufaizal¹, Andi Afrizal², Seprini³

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian

Email: jupe.izal@gmail.com

²Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian

³Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian

Abstract

Jufaizal, 1225077. 2016. Analysis of Effectiveness of levy garbage collection in Rokan Hulu. Advisor I: Andi Afrizal, SE., M.Si, AK, CA, and Advisor II: Seprini, SE., MM.

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of fee collection bins in Rokan Hulu. Informants in this study is the one who really knows or actors that are directly involved with research problems concerning this waste retribution. The results of this study show that the effectiveness of 4 (four) years in a row from 2011, 2012, 2013 and 2014 respectively was 68.33%, 95.91%, 96.14% and 107.95 %. The effectiveness of the waste levy / hygiene for the period of 2011 to 2014 reached an average of 92.08% annually mean that local governments need Rokan Hulu fairly strong effort in optimizing its officers to levy the fees of waste / cleanliness of the houses of citizens / shops and other public facilities. Suggestions put forward the local government needs to pay attention and are committed to achieving the targets that were obtained for the years to come and should also consider the contribution of local taxes and levies from other sectors such as a hotel, restaurant and parking facilities for example to further increase revenue (PAD) in Rokan Hulu.

Keywords: waste retribution

1. PENDAHULUAN

Sampah telah menjadi isu dalam rangka pembangunan khususnya di daerah, hal ini karena sampah belum ditangani secara baik. Saat ini sampah ditangani oleh Pemerintah Daerah dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Sehingga penanganan sampah tidak dapat optimal dilakukan. Keterbatasan ini diantaranya minimnya sarana dan prasarana, teknologi pengolahan, mekanisme pengelolaan serta masih banyak masalah terutama terhadap lingkungan. Salah satunya masalah dengan lingkungan meningkatnya sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang menimbulkan masalah keterbatasan lahan TPA dan biaya pemrosesan sampah di TPA semakin besar. Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari 16 Kecamatan dengan

ibukota di Kecamatan Rambah saat ini sedang melakukan pembangunan dan penataan kota. Hal ini terlihat dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2002 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Paradigma pengelolaan sampah pada awalnya hanya terbatas pada kumpul - angkut - buang. Dari sisi waktu pengelolaan dengan pendekatan ini relatif cepat karena hanya melalui 3 tahapan akan tetapi tidak efisien. Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga merupakan bagian yang wajib untuk daerah menganggarkan

dalam APBD untuk biaya pengelolaan sampah melihat kondisi yang ada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu setiap tahun telah mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah. Secara formal pembiayaan pengelolaan sampah telah terpenuhi akan tetapi secara pemenuhan kebutuhan belum mencukupi. Secara umum alokasi pembiayaan untuk sektor persampahan masih dibawah 5% dari total anggaran APBD, rendahnya biaya tersebut pada umumnya karena pengelolaan persampahan masih belum menjadi prioritas dan menggunakan pola penanganan sampah yang ala kadarnya tanpa memperhitungkan faktor keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini anggaran pengelolaan sampah masih di bawah 1 % sehingga akan sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal. Saat ini berdasarkan DPA Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu anggaran pengelolaan sampah hanya mencukupi untuk biaya operasional bahan bakar sehingga untuk melakukan upaya lainnya tidak memiliki anggaran yang cukup. Pembiayaan pengelolaan sampah terdiri dari pemasukan yang bersumber dari retribusi yang dikelola oleh dinas tersendiri, dalam SNI 3242-2008 tentang pengelolaan sampah permukiman bahwa pembiayaan harus memperhatikan peningkatan kapasitas pembiayaan untuk menjamin pelayanan dengan pemulihan biaya secara bertahap supaya sistem dan institusi, serta masyarakat dan dunia usaha punya kapasitas cukup untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas lingkungan untuk warga. Yang terjadi saat ini Kabupaten Rokan Hulu menarik retribusi kebersihan kepada masyarakat, retribusi diatur dalam peraturan daerah retribusi jasa umum, untuk pemukiman retribusi yang dikenakan rata-rata sebesar Rp. 10.000/bulan dengan pengambilan sampah 1 kali dalam satu minggu. Nilai itu belum dapat menutupi biaya operasional untuk itu dibutuhkan penyesuaian retribusi. Penyesuaian retribusi harus memperhatikan daya beli masyarakat, karena sesuai dengan SNI 3242-2008 peningkatan pembiayaan harus dapat menjamin peningkatan pelayanan dan juga keberlangsungan pengelolaan sampah. Dengan dukungan masyarakat pemerintah dapat melakukan penyesuaian tarif retribusi yang diikuti dengan peningkatan pelayanan. Oleh karena itu, pembiayaan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu baru memenuhi syarat formal dan belum memenuhi unsur kecukupan dalam peningkatan pelayanan pengelolaan sampah.

Selain hal tersebut dibutuhkan penggalian sumber-sumber pembiayaan diluar retribusi dan APBD untuk pembiayaan pengelolaan sampah. Berikut Tabel target dan realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan
di Kabupaten Rokan Hulu

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
2011	400.000.000	273.300.000	68,33%
2012	400.000.000	383.644.000	95,91%
2013	400.000.000	384.560.000	96,14%
2014	400.000.000	431.805.000	107,95%

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kab. Rokan Hulu, Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan dari tahun 2011 sampai 2013 tidak pernah mencapai target jumlah yang diharapkan. Tahun 2014 realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mengalami peningkatan dan melebihi target yang ditetapkan. Rata-rata besarnya persentase realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar 92,08% setiap tahunnya. Nilai realisasi penerimaan yang masih jauh dari target yang diharapkan merupakan suatu indikasi bahwa sebenarnya ada potensi yang belum digali secara optimal dalam retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan besarnya target yang ditetapkan terlalu kecil dan dalam menetapkan target kurang memperhatikan potensi yang ada. Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui rata-rata kenaikan target penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada tahun 2011 realisasi hanya mencapai 68,33%, masih kurang 31,68% lagi yang harus dikejar untuk mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu 27,59% (walaupun realisasi tahun 2012 hanya 95,91%). Pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang kecil yaitu hanya 0,23% (realisasi tahun 2013 hanya 96,14%).

Namun pada tahun 2014 kenaikan target penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan lumayan baik jika dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu 11,81% (persentase penerimaan retribusi sudah mencapai 107,95%). Rata-rata besarnya realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp 368.327.250 setiap tahunnya.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Salah satunya dari penerimaan sektor retribusi daerah yang diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan. Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Namun pada kenyataan yang ada, beberapa hambatan dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi disinyalir terkendala hal-hal berikut:

1. Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu selama 4 (empat) tahun terakhir (tahun 2011 sampai dengan tahun 2014) masih berkisar pada angka Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), tidak ada peningkatan pencapaian target penerimaan PAD dari sektor pelayanan persampahan/kebersihan.
2. Berdasarkan data tabel 1.1 terlihat bahwa realisasi penerimaan PAD dari sektor pelayanan persampahan/kebersihan terus mengalami peningkatan yang berarti jumlah penduduk/rumah tangga sebagai objek pungutan retribusi juga meningkat, namun realisasi yang diharapkan belum sepenuhnya optimal terbukti pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 penerimaan perolehan retribusi PAD nya tidak mencapai 100%.
3. Dugaan sementara terkait retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang tidak mencapai target tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar tagihan retribusi sampah. Masyarakat/rumah tangga/ruko ada kalanya menolak untuk membayar tagihan yang diajukan petugas.

Beberapa faktor yang menyebabkan terkendalanya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu tersebut di upayakan dengan berbagai cara. Salah satu cara untuk meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan pendapatan dari retribusi yang dalam hal ini adalah semua retribusi yang dapat dipungut dari daerah terutama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Pihak pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan bertujuan untuk peningkatan penerimaan daerah yang diperlukan bagi keperluan dana pembangunan yang berasal dari sumber-sumber PAD.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis mencoba menyusun skripsi dengan judul “**Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Sampah di Kabupaten Rokan Hulu**”.

Perumusan Masalah

Dari uraian dan latar belakang penelitian diatas, maka perumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi sampah di Kabupaten Rokan Hulu”?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi sampah di Kabupaten Rokan Hulu.

2. Landasan Teori

Pengertian Efektivitas

Menurut Siagian (2007:24) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Pasolong (2007:4) efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Menurut Mahmudi (2005:92) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Pendapat lain juga dinyatakan oleh Susanto, yaitu: “efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi” (Winardi, 2007:156). Berdasarkan definisi tersebut, peneliti beranggapan bahwa efektivitas bisa tercipta jika pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi khalayak yang diterpanya.

Adapun menurut pendapat Cambell yang dikutip oleh Richard M. Steers dalam bukunya Efektivitas Organisasi menyebutkan beberapa ukuran daripada efektivitas, yaitu:

- a. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi;
- b. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;
- c. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;
- d. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut;
- e. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi;
- f. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya;
- g. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu;
- h. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu;
- i. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki;
- j. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan;

- k. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan;
- l. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan (Wibawa, 2003:46-48).

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Ukuran Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang diterapkan dan secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara *Outcome* dan *Output* (Mardiasmo, 2009:3).

Sedangkan rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah dan dinyatakan dalam persentase (Halim, 2007:234).

Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Halim (2007:235) efektivitas retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan retribusi yang ditargetkan. Maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan retribusi daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan Daerah}}$$

Sumber: (Nick Devas dalam Rahmawati (2012:32)

Semakin besar nilai efektivitas berarti semakin tinggi efektivitas penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan efektivitas penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Rokan Hulu dapat juga dengan memberikan peringkat atau nilai hasil akhir

dengan menggunakan skala peringkat menurut Mahmudi (2007). Skala peringkat yang digunakan adalah :

- a) Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
- b) Hasil perbandingan tingkat pencapaian sama dengan 100% berarti efektif.
- c) Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.

Dengan skala peringkat ini dapat juga kita gunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dari penerimaan retribusi daerah lainnya yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan oleh para pakar diatas mengenai efektivitas, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Nick Devas dalam Rahmawati (2012:32) dalam penelitian ini.

Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan peneliti melalui data yang terkumpul. Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga pelaksanaan pemungutan retribusi sampah di Kabupaten Rokan Hulutingkat pencapaiannya dibawah 100% yang berarti tidak efektif.

3. Metode Penelitian

Pemilihan informasi sebagai sumber data atau informan dalam penelitian ini berdasarkan asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi kriteria. Kriteria memilih informan sebagai narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian
Sumber: Hasil Observasi Penulis, Tahun 201

No	Informan	Jumlah Sampel	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin
1.	Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya	1 Orang	Pascasarjana (S2)	Laki-laki
2.	Kepala Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman	1 Orang	Sarjana (S1)	Laki-laki
3.	Kepala Seksi Kebersihan	1 Orang	Sarjana (S1)	Laki-laki
4.	Camat Rambah	1 Orang	Sarjana (S1)	Laki-laki
5.	Lurah Pasir Pengaraian	1 Orang	Sarjana (S1)	Laki-laki
6.	Petugas Pemungut Retribusi Sampah	5 Orang	SLTA	Laki-laki
7.	Masyarakat/pelanggan tetap pemungutan Retribusi sampah	20 Orang	Sarjana= 7 SLTA = 12 SLTP = 1	Laki-laki=13 Perempuan = 7

Sumber: Hasil Observasi Penulis, Tahun 2010

Setelah dalam proses pengumpulan data tidak lagi ditemukan variasi informasi, maka peneliti tidak mencari informasi baru, proses pengumpulan informasi dianggap selesai. Dengan demikian penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi juga bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari kergaman fenomena sosial yang diteliti.

Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif.

- a. Data kuantitatif, yaitu data-data berbentuk angka yang diperoleh dari dinas instansi terkait yang berkaitan dengan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber retribusi persampahan/kebersihan.
- b. Data kualitatif, yaitu uraian-uraian kalimat yang diperoleh berupa informasi penelitian melalui kegiatan wawancara dengan responden penelitian terpilih.

Sumber data penelitian ini dibedakan atas:

- a. Data Primer adalah data yang penulis peroleh dari hasil penelitian langsung dari tanggapan responden melalui kuisioner yang diberikan mengenai Efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi sampah.
- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh dalam bentuk data yang sudah tersedia yang diperoleh pada kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu.

4. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan perhitungan kontribusi pendapatan retribusi persampahan/ kebersihan di tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dapat diketahui kontribusi pendapatan retribusi persampahan/ kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2.

Rekapitulasi Tingkat Pertumbuhan serta efektivitas Retribusi Persampahan/Kebersihan Tahun 2011 s.d 2014

Tahun	Persentase	Kriteria Efektivitas
2011	68,33%	Tidak Efektif
2012	95,91%	Tidak Efektif
2013	96,14%	Tidak Efektif
2014	107,95%	Efektif
Rata- rata	92,08%	Tidak Efektif

Sumber: data hasil olahan peneliti, tahun 2016

Dari hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan pertumbuhan Retribusi Persampahan/Kebersihan Kabupaten Rokan Hulu terus mengalami peningkatan. Dari hasil penelitian yang diperoleh juga dapat menunjukkan keefektivitasan Pemerintah Daerah kabupaten Rokan Hulu dalam mengevaluasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari penerimaan Retribusi Persampahan/Kebersihan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi hasil penerimaan yang bersumber dari penerimaan Retribusi Persampahan/Kebersihan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yang mengalami peningkatan terutama di tahun 2014 mencapai target diatas 100% dengan nilai rasio efektivitas diatas 1. Ini menunjukkan dapa tahun 2014 kinerja untuk realisasi penerimaan Retribusi Persampahan/Kebersihan pada tahun 2014 sudah optimal.

Berdasarkan hasil penerimaan Retribusi Persampahan/Kebersihan dari target yang ditetapkan, hasil penerimaan selama 4 (empat) tahun menunjukkan peningkatan efektivitas penerimaan Retribusi Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Rokan Hulu. Dengan efektivitas selama 4 (empat) tahun secara berturut-turut dari tahun 2011 nilai efektivitas Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah sebesar 68,33%. Tahun 2012 nilai efektivitas Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah sebesar 95,91%. Tahun 2013 nilai efektivitasRetribusi Persampahan/Kebersihan adalah sebesar 96,14%. Tahun 2014 nilai efektivitas Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah sebesar 107,95% dengan rata-rata efektivitas baru mencapai 92,08%. Peningkatan penerimaan Retribusi Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan hal ini disebabkan pemerintah daerah kabupaten Rokan Hulu mengarahkan sumber daya tenaga pemungut retribusi persampahan untuk memungut retribusi persampahan/dana kebersihan di rumah warga dan toko/fasilitas umum lainnya.

Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi sampah di Kabupaten Rokan Hulu, efektivitas retribusi persampahan/kebersihan selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 rata-rata baru mencapai 92,08% pertahunnya.

Hal ini berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tidak efektif karena hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% yang berarti sesuai dengan ukuran efisiensi hasilnya adalah tidak efektif.

Saran

Dari kesimpulan yang dikemukakan diatas maka berikut ini akan dikemukakan saran-saran penulis sebagai berikut:

1. Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 diperoleh tingkat efektivitas penerimaan retribusi persampahan/kebersihan masih tergolong rendah dan tidak efektif, pemerintah daerah perlu memperhatikan dan berkomitmen untuk mencapai target-target yang diperoleh untuk tahun-tahun mendatang.
2. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu agar lebih melengkapi sarana dan prasarana persampahan yang ada agar pelanggan mau membayar uang retribusi persampahan/kebersihan.
3. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu agar lebih menambah personil pemungut retribusi persampahan/kebersihan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Rokan Hulu.
4. Penelitian yang akan datang perlu juga mempertimbangkan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dari sektor lainnya misalnya hotel, restoran dan fasilitas parkir misalnya untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Rokan Hulu.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badjuri Abdulkahar, Teguh Yuwono, 2003, *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*, FISIP UNDIP, Semarang.
- Farah Wulandari, dkk (2011), *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang (Studi pada Retribusi Sampah dan Layanan kebersihan)*, Jurnal Aplikasi Manajemen, Volume 9 Nomor 3 Tahun 2011.
- Husseini, Martini dan Lubis, 2011, *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*, Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Halim. Abdul (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Isti Surjandari, dkk, 2011, *Model Dinamis Pengelolaan Sampah Untuk Mengurangi Beban Penumpukan*, Jurnal Teknik Industri, Vol. 11, No. 2, Desember 2009, pp. 134-147, ISSN 1411-2485
- Kamalludin, 2013, *Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang*, Jurnal Reformasi, Volume 3, Nomor 1, Januari – Juni 2013
- Kurniawan Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Mahi, Raksasa, 2007. *Prospek Desentralisasi di Indonesia ditinjau dari segi Pemerataan antar Daerah dan Peningkatan Efisiensi*, Analisis CSIS Tahun XXIX/2000 No. 1, 54-56.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI: Yogyakarta.
- Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2002 tentang *retribusi pelayanan persampahan/kebersihan*.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. ALFABETA.
- Steers Richard. M.. 2005. *Efektivitas Organisasi*. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2005, *Manajemen Publik*, Jakarta, PT. Grasindo.
- Thoha, Miftah. 2010, *Kepemimpinan dan Manajemen*, Devisi Buku Perguruan Tinggi, PT. Raja Grafindo Persada, Kakarta.

- Umar, Husein, 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Salemba Empat.
- Usman, 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Wibawa, Samodra. 2006. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Winardi, J. 2007. *Motivasi dan Pemotivasian Dalam Manajemen*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rahmawati, Siti, 2012. *Kontribusi Pajak daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatn Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Periode 2006-1010*, Skripsi, Non Publikasi.
- Siagian, Sondang P, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.